

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian para pelaku bisnis di dunia. Bahkan di Indonesia kecurangan akuntansi sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Menurut Wilopo (2006), pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah pada adanya kecurangan atau penipuan. Kecenderungan kecurangan dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis (Soepardi, 2007).

Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi, khususnya di Indonesia menunjukkan bahwa kecurangan masih tinggi di pemerintah atau di perusahaan swasta maupun BUMN, padahal BUMN didirikan untuk mengembangkan misi dalam memberikan kontribusi kepada negara, pelayanan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga membuat lemahnya kepercayaan publik

kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Faktanya fenomena yang terjadi yaitu BPK melaporkan pada laporan semester 1 tahun 2013 telah terjadi berbagai penyimpangan mulai dari kelemahan sistem pengendalian internal, penyimpangan efisiensi, administratif, dan lain-lain pada BUMN, BUMD, entitas pemerintah daerah dan pusat serta entitas lembaga keuangan lainnya yang mengelola keuangan negara sekitar 12,48 triliun (www.bpk.go.id, diakses 20 Oktober 2014, 19:42 WIB).

Sebagai entitas bisnis, peran BUMN dirasakan cukup dominan. Jumlahnya yang mencapai ratusan perusahaan dan asetnya yang secara total mencapai ratusan triliun rupiah dengan lingkup usaha yang rata-rata dapat digolongkan strategis. Oleh karena itu tidak heran BUMN menjadi sorotan masyarakat. Di Indonesia, perusahaan swasta maupun BUMN, belum sepenuhnya memenuhi atau menganut prinsip *good corporate governance* yang baik. Masih terdapat banyak kesalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama dalam prinsip akuntabilitas yang sangat rendah karena tidak adanya transparansi. Kemandekan dalam pelaksanaan audit terhadap aset negara tidak dikelola dengan transparan, tidak terdapat penyajian data yang rinci ke publik, sehingga sering menyebabkan *mark up* maupun kebocoran dana pada tingkat birokrat. Sejak tahun 2005 hingga 2011, BPK telah merekomendasikan penyelesaian kerugian negara terhadap BUMN (termasuk anak perusahaan) sebesar Rp 20.397.233.650.000,00. Laporan KPK tahun 2011 juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2011 terdapat pengaduan terhadap BUMN/UMD sebanyak 36.001 kasus. Praktik

kecurangan di BUMN ini pada akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengurangi efisiensi BUMN. (www.bpk.go.id, diakses 20 Oktober, 22:23 WIB).

Ada beberapa kasus tindak kecurangan yang terjadi di Indonesia. Pada Desember 2006 Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ruislaag (tukar guling) antara aset PT Industri Sadang Nusantara (ISN), sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan aset PT GDC sebuah perusahaan swasta.

Dalam ruislaag tersebut PT ISN menukarkan tanah seluas 178.497 meter persegi di kawasan Senayan dengan tanah seluas 47 hektar beserta pabrik dan mesin di Karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester II Tahun Anggaran 1998/1999, menyatakan ruislaag itu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 121,628 miliar.

Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT GDC senilai Rp 63,954 miliar, berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT Sucofindo pada tahun 1999, penyusutan nilai aset pabrik milik PT GDC senilai Rp 31, 546 miliar, dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai Rp 0,127 miliar. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan oleh PT GDC sebesar Rp 26 miliar.

Dalam kasus ruislaag tersebut, karena ketidakjelasan prosedur dan syarat-syarat tukar guling aset, sehingga sangat rawan untuk diselewengkan. Seharusnya keputusan tukar guling tidak hanya menjadi wewenang salah satu pejabat saja, melainkan melibatkan beberapa pejabat sebagai pengendali dan kontrol yang baik. Selain itu juga diperlukan sebuah aturan baku oleh perusahaan mengenai tukar

guling, sehingga kemungkinan penyelewengan menjadi berkurang. Diperlukan juga kontrol dari lembaga bersangkutan terhadap penelitian tim penilik yang meneliti kelengkapan mengenai status aset. Dokumen kelengkapan aset, sehingga tidak ada manipulasi dari nilai aset tersebut serta proses tukar menukar.

Kasus lainnya yang menimpa salah satu BUMN, yaitu PT Kimia Farma Tbk yang melakukan *mark-up* laporan keuangan, yaitu terjadinya penggelembungan laba bersih pada laporan keuangan tahun 2001 sebesar RP 32,668 miliar. Perusahaan seharusnya menyajikan laba bersih sebesar Rp 999,594 miliar, namun perusahaan menyajikan laba bersih sebesar Rp 132 miliar. Kecurangan tersebut terungkap karena Bapepam menilai laba yang diperoleh perusahaan terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa sehingga dilakukan audit ulang oleh Bapepam pada laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001, hasil audit tersebut menyatakan bahwa perusahaan melakukan *overstated* penjualan dan persediaan yang mengakibatkan kesalahan penyajian laporan keuangan (Bapepam, 2002).

Kasus lainnya mengenai kecurangan (*fraud*) yang menimpa BUMN di Indonesia adalah kasus yang menimpa PT Barata Indonesia (Persero). Kasus ini dilakukan oleh Mahyudin Harahap (Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT Barata Indonesia) yang diduga menjual aset negara berupa tanah bersama dengan Ir. Harsusanto (Direktur PT Barata Indonesia) dan Shindo Sumidomo. Penjualan aset ini terjadi pada tahun 2003-2005 lalu. Penjualan aset tersebut dinilai bertentangan dengan UU RI No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Kepmen Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tentang pemindahan aktiva tetap

BUMN. KPK memaparkan tindak pidana korupsi kasus ini dilakukan dengan cara menurunkan Nilai Jual Objek Tanah milik PT Barata Indonesia (Persero) yang berlaku tahun 2004. Tanah yang dijual berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Diungkapkan harga tanah yang seharusnya Rp 132 milyar kemudian dijual kepada swasta dengan harga sekitar Rp 82 milyar. Perbuatan ini dinilai memperkaya pihak tim taksasi penjualan aset sebesar Rp. 894 juta lebih dan Shindo Sumidomo dari PT Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp 21,770 miliar. Negara pun dirugikan hingga Rp 22,690 miliar lebih (www.merdeka.com, diakses 20 Oktober 2014, 19:15 WIB).

Adapun kasus lain yang terjadi adalah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 yang baru terungkap tahun 2013, yaitu terjadinya pembobolan pada bank tersebut. Kejadian ini bermula pada tahun 2001, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menempatkan dana sebesar Rp 195 milyar di BNI Cabang Radio Dalam, Jakarta Selatan. Agus Salim selaku Kepala Cabang BNI Radio Dalam lantas memindahbukukan dana tersebut ke rekening Faisal A. sebesar Rp 50 milyar dan ke rekening Dedy Suryawan sebesar Rp 145 milyar. Akibat perbuatan ketiganya, negara dalam hal ini dari PT BNI Cabang Radio Dalam, telah dirugikan sebesar Rp 50 milyar. (www.detik.com, diakses 20 Oktober 2014, 19:27 WIB).

Dari kedua kasus terakhir yang diungkapkan oleh penulis di atas dapat terlihat bahwa di dalam perusahaan tersebut terjadi suatu tindak kecurangan (*fraud*) dimana hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pengendalian intern di perusahaan tersebut sehingga kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan oleh siapapun

baik manajemen maupun karyawan. Kecurangan (*fraud*) itu juga dapat terjadi karena tidak adanya komitmen antara manajemen dan para karyawan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan anti *fraud* sehingga dalam kasus tersebut baik manajemen maupun karyawan merasa bebas melakukan tindak kecurangan (*fraud*) karena tidak ada kesepakatan apapun maupun sanksi apapun.

Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam organisasi untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau sekelompok orang. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Hiro Tugiman (2006:32) yang mendefinisikan *fraud* sebagai “suatu susunan ketidakberesan dari perbuatan ilegal yang merupakan suatu muslihat yang dilakukan untuk keuntungan atau kerugian organisasi, yang dilakukan oleh orang di luar atau orang di dalam organisasi”.

Untuk menangani masalah kecurangan ini, diperlukan suatu pengawasan (*monitoring*). Untuk mendapatkan hasil *monitoring* yang baik, diperlukan audit internal yang baik. Audit internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang.

Menurut Hery (2010:64), audit internal perusahaan yang lemah dan tidak kompeten akan mengakibatkan pencegahan kecurangan dalam perusahaan tersebut tidak berjalan baik dan efektif. Namun sebaliknya audit internal yang kuat dan kompeten dapat mendorong pencegahan kecurangan dalam suatu perusahaan berjalan dengan baik dan efektif sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Keefektifan audit internal mempunyai pengaruh

yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan terjadinya kecurangan, dengan adanya audit internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain.

Menurut Hery (2010:20), Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Saat ini keberadaan Audit Internal sudah merupakan suatu bagian penting dari perusahaan. Keberadaannya terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia bisnis yang membutuhkan penanganan secara profesional. Audit Internal yang sudah profesional di bidangnya ini akan berpengaruh besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam suatu organisasi yang tentunya akan sangat membantu manajemen dalam menghadapi persaingan bisnis.

Menurut Hery (2010:73), standar profesional audit internal terbagi atas empat macam, yaitu independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, dan pelaksanaan pemeriksaan. Dengan demikian, pada prinsipnya Audit Internal merupakan pemeriksaan intern yang independen, yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Untuk itu Audit Internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian, dan mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindaklanjuti.

Audit internal juga dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*), yang mencakup identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) dan penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai dari lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian. Seandainya terjadi kecurangan (*fraud*), audit internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah kecurangan (*fraud*) dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektifitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam berbagai segmen (Modul *Fraud Auditing*, Pusdiklatwas BPKP Tahun 2008).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adimas Luhur pada tahun 2010 dengan judul “Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan” yang dilakukan di PT PLN Distribusi Jawa Barat-Banten dengan mengambil data tahun 2010. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah audit internal dan kecurangan (*fraud*) dimana populasi dari penelitian ini adalah bidang audit internal PT PLN Distribusi Jawa Barat-Banten dengan mengambil sampel 10 orang responden dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *startified random sampling* yaitu pemilihan sampel secara acak. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan audit internal terhadap pencegahan kecurangan di PT PLN Distribusi Jawa Barat-Banten sudah memadai dimana hal ini dapat dilihat dengan adanya peranan yang cukup signifikan dari audit internal dalam pencegahan kecurangan tersebut. Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis melakukan penelitian di

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan mengambil data tahun 2014. Variabel yang diteliti sama dengan penelitian sebelumnya yaitu audit internal dan kecurangan (*fraud*) tetapi ada perbedaan dalam hal indikator variabel audit internal (variabel X) dan variabel serta dimensi dari variabel kecurangan (variabel Y). Perbedaan lainnya yaitu penulis mengambil sampel 30 responden dan menggunakan teknik sampling *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) (Studi Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero))”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian yang berarti bagi mahasiswa akuntansi untuk memperluas pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan program studi Akuntansi Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, serta menambah wawasan dan informasi mengenai Audit Internal sehingga diperoleh pengetahuan yang bermanfaat.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Audit Internal.

3. Bagi pihak lain

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan wawasan masyarakat pada umumnya terhadap bidang akuntansi khususnya mengenai audit internal dan dijadikan sumber informasi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah penelitian.